

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian. Pembahasan mengenai invasi militer yang dilakukan Prancis di wilayah Sahel merupakan hal yang umum dan telah sejak lama menarik para peneliti internasional untuk meneliti dan menghasilkan penelitian mengenai topik ini.

Namun penelitian dan analisis mengenai faktor rasionalitas yang dilakukan Prancis dalam penarikan pasukannya di wilayah Sahel masih sangat sedikit. Sehingga dalam tinjauan literatur ini, peneliti memaparkan 6 (enam) penelitian terdahulu yang membahas mengenai penarikan militer Prancis di wilayah Sahel.

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	<p><i>The Strong 'Weak State': French Statebuilding and Military Rule in Mali.</i> Publikasi: Journal of Intervention and Statebuilding.</p>	Joe Gazeley	<p>Dalam pembahasan umum, literatur ini memiliki kesamaan dalam membahas faktor dan dampak intervensi militer Prancis di Mali.</p>	<p>Literatur menggunakan teori yang berbeda, diantaranya teori hegemoni, teori strategi, dan teori perencanaan kekuatan. Fokus permasalahan literatur pun hanya berpusat pada dua aktor yaitu Prancis dan Mali serta kegagalan intervensi Prancis yang disebabkan oleh penilaian historis kepada Mali dalam memahami struktur negara dan pembangunannya.</p>
2	<p><i>Counter - Insurgency Governance in the Sahel.</i> Publikasi: International Affairs. 97:6</p>	Bruno Charbonneau	<p>Literatur memiliki persamaan yang terletak pada fokus pembahasan untuk menganalisis kegagalan mengatasi konflik regional di Sahel.</p>	<p>Perbedaan terletak pada penyebutan <i>counter-insurgency</i> dengan <i>counter-terrorism</i> terkait konflik di Sahel. Selain itu literatur ini hanya menggunakan konsep dan paradigma <i>counter-insurgency</i> sebagai penunjang argumentasi penulis. Berfokus pada dampak <i>counter-insurgency</i>, literatur ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh prinsip dan kegagalan bantuan aktor internasional.</p>
3	<p><i>The Foreign Security Policy in Africa: France in Sahel Region.</i> Publikasi: American</p>	Sylvain Medessoukou	<p>Literatur ini memiliki kesamaan pada daerah permasalahan yang diambil yaitu wilayah</p>	<p>Inti pembahasan menitikberatkan pada kesalahan kebijakan keamanan Prancis yang diterapkan di Sahel sekalipun sama-sama membahas mengenai</p>

	Research for Engineering Technology, and Sciences (ASRJETS), 47 (1), 156-165		Sahel serta membahas mengenai kegagalan resolusi konflik.	kegagalan resolusi konflik.
4	<i>French Intervention in Mali: Strategic Alliances, Long-term Regional Presence?</i> Publikasi: Small Wars & Insurgencies. 27:1, 59-80	Susanna D. Wing	Terletak pada kesamaan penggunaan konsep <i>counter-terrorism</i> dan <i>war on terror</i>	Selain hanya berdasar pada konsep <i>counter-terrorism</i> dan <i>military intervention</i> , literatur ini memiliki kesimpulan bahwa resolusi konflik yang dilakukan mengalami kegagalan dikarenakan kesalahan Prancis dalam memahami akar permasalahan konflik.
5	<i>Fighting for Liberal Peace in Mali? The Limits of International Military Intervention.</i> Publikasi: Journal of Intervention and Statebuilding, 8:2-3, 192-213.	Bruno Charbonneau dan Jonathan M. Sears	Selain melibatkan aktor Prancis dan Mali, literatur memiliki kesamaan dalam menganalisis kegagalan intervensi dan strategi yang digunakan Prancis di Mali.	Literatur hanya berfokus pada analisis ideologi hegemoni dan legitimasi dalam intervensi Prancis di Mali dengan menggunakan teori <i>liberal peace</i> dan konsep <i>military intervention</i> .
6	<i>Battling Instability? The Recurring Logic of French Military Interventions in Africa.</i> Publikasi: African Security, 10:1, 47-72	Nathaniel K. Powell	Terletak pada kesamaan ruang lingkup intervensi Prancis di Afrika dan analisis faktor kegagalan dalam intervensi militer.	Literatur menggunakan pendekatan teori stabilitas hegemoni dan berfokus pada faktor historis dalam menganalisis intervensi militer berbasis <i>counter-terrorism</i> . Dengan melihat dampak dari hasil intervensi, analisis faktor kestabilan yang berpengaruh pada keberhasilan intervensi

				sangat berbeda dengan yang disimpulkan oleh peneliti. Dimana penulis menyimpulkan bahwa kegagalan intervensi disebabkan oleh faktor eksternal dari intervensi Prancis.
--	--	--	--	--

Literatur pertama berjudul “*The Strong ‘Weak State’: French Statebuilding and Military Rule in Mali*” ditulis oleh Joe Gazeley pada tahun 2022 dan di *publish* melalui *Journal of Intervention and Statebuilding*. Literatur ini memiliki fokus untuk melihat bagaimana hasil intervensi yang dilakukan Prancis untuk mengatur kondisi dan menciptakan strategi pembangunan negara Mali. Dengan menggunakan teori hegemoni, teori strategi, dan teori perencanaan kekuatan, penulis memiliki kesimpulan bahwa intervensi yang dilakukan Prancis pasca 2013 kurang memahami struktur negara terutama dalam posisi militernya. Prancis menilai Mali berdasarkan historis bahwa Mali merupakan negara yang lemah dari segi kekuatan militernya. Penilaian secara historis ini menyebabkan terhambatnya upaya pembangunan karena anggaran yang digunakan sebagian besar disalurkan untuk meningkatkan kekuatan militer Mali (Gazeley, 2022).

Sekalipun literatur ini memiliki fokus yang sama untuk mengukur faktor dan dampak intervensi militer Prancis di Mali, namun literatur ini menggunakan teori yang berbeda, diantaranya teori hegemoni, teori strategi, dan teori perencanaan kekuatan. Fokus permasalahan literatur pun hanya berpusat pada dua aktor yaitu Prancis dan Mali serta kegagalan intervensi Prancis yang disebabkan oleh penilaian historis kepada Mali dalam memahami struktur negara dan pembangunannya.

Literatur kedua yang ditulis tahun 2021 dengan judul “*Counter - Insurgency Governance in the Sahel*” oleh Bruno Charbonneau dalam jurnal *International Affairs* membahas mengenai pengaruh prinsip *counter - insurgency* dalam filosofi pemerintahan dan tatanan politik yang dibangun oleh aktor internasional yang dipandang melalui konsep *counter-insurgency*. Dengan kesimpulan bahwa *counter-insurgency* di Sahel secara bersamaan merupakan cara pemerintahan dan jaringan praktik politik dan kontestasi yang telah gagal total dalam menghasilkan atau memfasilitasi penciptaan ruang dan populasi yang dapat diatur di bawah otoritas negara berdaulat. Alih-alih, Prancis mereproduksi logika intervensi terus-menerus sebagai bagian integral dari kemungkinan negara-negara Sahel (Charbonneau, 2021).

Gap penelitian ditemukan berdasarkan perbedaan yang terletak pada penyebutan *counter-insurgency* dengan *counter-terrorism* terkait konflik di Sahel. Selain itu literatur ini hanya menggunakan konsep dan paradigma *counter-insurgency* sebagai penunjang argumentasi penulis. Berfokus pada dampak *counter-insurgency*, literatur ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh prinsip dan kegagalan bantuan aktor internasional. Sedangkan kesamaan letak penelitian terdapat pada fokus pembahasan untuk menganalisis kegagalan mengatasi konflik regional di Sahel.

Literatur ketiga ditulis oleh Sylvain Medessoukou pada tahun 2018 dengan judul “*The Foreign Security Policy in Africa: France in Sahel Region*” yang di *publish* dalam *American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences* (ASRJETS). Melalui penggunaan teori kompleks keamanan kawasan, penulis bertujuan untuk menganalisis hasil kebijakan keamanan Perancis dalam

mengembangkan pembangunan keamanan regional di G5 Sahel. Penulis berkesimpulan bahwa komunitas internasional tidak cukup untuk mengatasi masalah keamanan di Sahel. Kebijakan keamanan Prancis hanya berfokus pada satu bidang saja yaitu kekuatan militer. Sedangkan dalam waktu yang bersamaan, Prancis mendesak memperluas kebijakannya selain pada sarana militer tanpa memperhatikan kendali angkatan bersenjata regional, sehingga kebijakan Prancis dinyatakan gagal karena menciptakan ketidakmampuan keamanan di daerah G5 Sahel (Medessoukou, 2018).

Memiliki kesamaan yang terletak pada kegagalan resolusi konflik di Sahel, namun literatur ini memiliki perbedaan yang signifikan, yaitu inti pembahasan yang menitikberatkan pada kesalahan kebijakan keamanan Prancis yang diterapkan di Sahel sekalipun sama-sama membahas mengenai kegagalan resolusi konflik.

Literatur keempat dengan judul "*French Intervention in Mali: Strategic Alliances, Long-term Regional Presence?*" ditulis oleh Susanna D. Wing pada tahun 2016 pada jurnal *Small Wars & Insurgencies*. Memandang menggunakan konsep *counter-terrorism* dan *military intervention*, penulis berfokus pada strategi Prancis dalam membingkai konflik Mali untuk keuntungan Prancis tersendiri. Fokus permasalahan yang terdapat dalam literatur ini menarik kesimpulan bahwa krisis di Mali merupakan isu yang kompleks. Perpindahan misi Prancis dari Operasi Serval ke Operasi Barkhane ditujukan Prancis untuk melepaskan diri dari masalah internal Mali dengan menjalankan strategi *war on terror* secara regional. Kurangnya pemahaman dari akar permasalahan pemberontakan bersenjata dan konflik yang berkelanjutan telah dikontekstualisasikan oleh Prancis dengan campur

tangan dan perluasan militer di wilayah Sahel sebagai upaya *counter-terrorism* (Wing, 2016b).

Meskipun terdapat persamaan mengenai penggunaan konsep *counter-terrorism* dan *war on terror*, peneliti menemukan *gap research* dimana literatur berdasar pada konsep *military intervention*, dan memiliki kesimpulan bahwa resolusi konflik yang dilakukan mengalami kegagalan dikarenakan kesalahan Prancis dalam memahami akar permasalahan konflik.

Literatur kelima ditulis melalui *Journal of Intervention and Statebuilding* dengan judul “*Fighting for Liberal Peace in Mali? The Limits of International Military Intervention*” pada tahun 2014 oleh Bruno Charbonneau dan Jonathan M. Sears. Dengan masalah penelitian untuk menggali lebih dalam bentuk ideologis atas kritik perdamaian liberal dan dinamika militer terhadap intervensi yang dilakukan Prancis di Mali, melalui teori *liberal peace* dan *military intervention*, penulis memiliki argumentasi bahwa tatanan global yang kontradiktif mengungkapkan bahwa dalam perdamaian liberal, persoalannya terdapat pada konsistensi ideologis yang dimiliki Prancis. Di Mali, kriteria ideologis yang ditetapkan Prancis adalah hegemoni dan legitimasi. Melalui proses reformasi, rekonsiliasi, dan pembangunan, ideologi Prancis seakan menyoroiti politik transnasional yang mengesahkan perang dan batasan yang diberlakukannya dengan dalih membentuk sebuah “perdamaian” di Mali (Charbonneau & Sears, 2014b).

Berdasarkan kesimpulan tersebut, literatur memiliki perbedaan yang terletak pada analisis ideologi hegemoni dan legitimasi dalam intervensi Prancis di Mali dengan menggunakan teori *liberal peace* dan konsep *military intervention*. Perbedaan ini sangat signifikan dibanding persamaan dengan penelitian yang

dilakukan peneliti, yaitu melibatkan aktor Prancis dan Mali, dimana kesamaan literatur terletak dalam menganalisis kegagalan intervensi dan strategi yang digunakan Prancis di Mali.

Literatur keenam ditulis oleh Nathaniel K. Powell dalam jurnal *African Security* tahun 2017, yang berjudul “*Battling Instability? The Recurring Logic of French Military Interventions in Africa*”. Menggunakan teori stabilitas hegemoni, penulis berfokus pada pendekatan militer yang dilakukan Prancis untuk kontra terorisme di Sahel berdasarkan ciri militer Prancis secara historis. Dalam literatur ini, penulis memiliki kesimpulan bahwa Prancis gagal dalam sebagian besar tujuan stabilisasinya di Afrika disebabkan oleh adanya penguatan faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakstabilan yang ingin diubah atau dibendung oleh Prancis. Intervensi Prancis telah menyebabkan hasil yang ambigu atau kontraproduktif dikarenakan sebagian besar intervensi yang dilakukan Prancis lebih banyak menghasilkan kerusakan dan kerugian dibanding keberhasilan positif (Powell, 2017).

Memiliki kesamaan yang terletak pada ruang lingkup intervensi Prancis di Afrika dan analisis faktor kegagalan dalam intervensi militer. Namun peneliti menemukan *gap* dengan perbedaan bahwa literatur menggunakan pendekatan teori stabilitas hegemoni dan berfokus pada faktor historis dalam menganalisis intervensi militer berbasis *counter-terrorism*. Dengan melihat dampak dari hasil intervensi, analisis faktor kestabilan yang berpengaruh pada keberhasilan intervensi sangat berbeda dengan yang disimpulkan oleh peneliti. Dimana penulis menyimpulkan bahwa kegagalan intervensi disebabkan oleh faktor eksternal dari intervensi Prancis.

Dari keenam sumber literatur, peneliti mendapat kesimpulan bahwa Operasi Barkhane sebagai gerakan *counter-terrorism* yang dijalankan oleh Prancis di wilayah Sahel merupakan operasi yang gagal dimana seluruh literatur condong menyalahkan Prancis sebagai aktor yang salah menginterpretasikan akar permasalahan di wilayah Sahel. Operasi Barkhane yang merupakan operasi suksesor dari Operasi Serval di Mali dan Operasi Epervier di Chad pada awalnya disambut baik oleh negara-negara di wilayah Sahel, namun Operasi Barkhane menjadi titik kegagalan Prancis dalam menjalankan gerakan *counter-terrorism*nya dan operasi tersebut dianggap sebagai gerakan neo-kolonialisme Prancis di wilayah Sahel.

Hal ini dibuktikan dengan literatur yang justru berfokus kepada sisi historis dari wilayah Sahel khususnya Mali dimana Prancis dinilai tidak memahami bagaimana struktur negara dan pembangunan yang berada di Mali. Lalu ditambah dengan kesalahan Prancis dalam menggunakan strategi yang menitikberatkan hanya kepada kekuatan militer dalam melawan kelompok teroris yang tersebar di wilayah Sahel. Prancis dinilai ingin menciptakan kekuatan hegemoni dengan melegalkan intervensi militer sebagai sarana untuk menciptakan perdamaian.

Akan tetapi, peneliti mendapatkan bahwa penghentian Operasi Barkhane tidak semata-mata terjadi akibat kesalahan Prancis dalam memahami akar konflik yang terjadi di wilayah Sahel, dalam hal ini justru pihak Prancis memilih untuk bersikap rasional dalam keputusannya menghentikan Operasi Barkhane. Hal ini didukung dengan beberapa tolak ukur rasionalitas yang tidak memposisikan Prancis sebagai aktor yang menyebabkan kegagalan dalam gerakan *counter-terrorism* di wilayah Sahel. Kondisi *state fragility* yang dihadapi negara-negara wilayah Sahel

meskipun telah mendapat bantuan Prancis, operasi bertahun-tahun dengan biaya yang cukup besar tanpa diiringi keselarasan stabilitas politik domestik negara-negara Sahel merupakan beberapa faktor yang dapat menggiring kepada keputusan rasional Prancis untuk menghentikan Operasi Barkhane.

2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1 Rational Choice Theory

Rational choice theory merupakan sebuah teori yang memiliki perspektif mengenai tindakan suatu individu atau aktor dalam menimbang dan menyeimbangkan antara biaya dan manfaat untuk memaksimalkan keuntungan yang akan didapat pribadi (Ogu, 2013). Teori ini memiliki beberapa asumsi diantaranya Struktur, Individualisme, Optimalitas, Keinginan Pribadi, dan Rasionalitas. Asumsi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. **Struktur.** Norma dan struktur yang hadir dalam suatu sistem internasional dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan rasional. Dalam proses tersebut, bisa saja struktur dan keadaan yang terjadi tidak selalu mendukung bagi pembuatan keputusan aktor sehingga merusak dan mempengaruhi keputusan yang dibuat, namun aktor tetap akan menemukan cara untuk mengoptimalkan keadaan tersebut.
2. **Individual.** Dalam pembuatan keputusan dan melakukan sesuatu, individu merupakan aktor utama. Dimana individu akan berlaku sebagai aktor yang rasional, memperhitungkan segala keputusan, mendahulukan kepentingannya, dan memaksimalkan kemungkinan. Hal ini menjadikan individu sebagai sumber yang utama dari hasil sosial di sistem lingkungan.

3. **Optimalitas.** Pembuatan dan pemilihan keputusan mengharuskan individu berbuat secara optimal dengan pertimbangan kendala dan peluang yang akan dihadapi oleh individu tersebut. Optimalisasi dalam suatu individu bisa terjadi ketika individu tersebut tidak memiliki pilihan lain yang lebih ingin dilakukan dalam situasi tersebut. Sehingga teori ini berasumsi bahwa individu melakukan dan mengeluarkan kemampuan terbaik dari apa yang bisa dilakukan.
4. **Keinginan Pribadi.** Bahwa individu akan sepenuhnya mementingkan kebutuhan dan keinginannya pribadi. Ada kemungkinan beberapa sentimen yang akan bertentangan dengan keinginan untuk mengoptimalkan suatu pilihan individu, seperti sentimen kelompok, kerjasama, dan tanggung jawab yang mengharuskan mendahulukan kepentingan orang lain. Namun sentimen seperti ini masih dapat dimasukkan ke dalam pilihan rasional individu karena bentuk-bentuk sentimen tersebut dapat dimanfaatkan oleh individu untuk mengejar kepentingan pribadi secara sekaligus. Sehingga individu tidak hanya dapat berhasil mengejar kepentingan pribadi tetapi juga bisa menjadi sarana dalam meningkatkan nilai dalam pandangan individu lainnya.
5. **Rasionalitas.** Menurut asumsi ini, setiap individu akan berpikir dan bertindak sesuai kemungkinan yang lebih menguntungkan individu tersebut dengan melakukan cara terbaik dan sangat menguntungkan, terutama yang memiliki biaya dan kerugian paling sedikit.

Kelima asumsi ini diperkuat dengan pernyataan Morgenthau dalam karyanya yang berjudul "*Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*" bahwa tatanan politik dalam sistem internasional yang bermoral dan didasari oleh rasionalitas dapat diwujudkan melalui prinsip-prinsip valid di atas. Dalam hal ini

berarti, sistem tersebut akan terwujud jika mengandalkan rasionalitas yang dimiliki para aktor karena tujuannya untuk kepentingan individu dibalik kepentingan bersama (Novelli, 2018).

Secara mutlak, Morgenthau memahami rasionalitas berdasarkan sifat natural manusia. Prinsip-prinsip moral dalam kepentingan bersama tidak sepenuhnya dapat diwujudkan, namun hal ini dapat tetap tercapai dengan keseimbangan kepentingan pribadi sementara dan penyelesaian konflik yang sangat genting. Dalam penelitian ini, *rational choice theory* digunakan untuk menganalisis faktor rasionalitas Prancis dalam penghentian Operasi Barkhane.

2.2.1.1 Rasionalitas

Menurut Glaser, rasionalitas dalam sistem internasional melibatkan aktor (negara) yang selalu bertujuan untuk melakukan upaya yang masuk akal untuk memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan mereka. Negara diasumsikan mampu untuk mengidentifikasi dan membandingkan pilihan, mengevaluasi peluang bahwa mereka akan berhasil, serta biaya dan keuntungannya (Glaser, 2010). Dalam menganalisis tindakan rasionalitas yang dilakukan Prancis dalam penghentian Operasi Barkhane, maka peneliti mengukur dari beberapa aspek berikut ini:

1. Cost-Benefit Analysis (CBA)

Analisis ini merupakan proses yang pemerintah gunakan untuk pembuatan dan evaluasi suatu kebijakan melalui kuantifikasi dan konsekuensi. Dalam tulisan *Ruling the World* karya Gruber, ia menyimpulkan bahwa realisme semakin menunjukkan format dari analisis *cost-benefit*. Negara bertindak bukan karena

mereka diharuskan untuk mengimbangi agresi untuk bertahan hidup, namun karena menerima insentif yang nyata (Gruber, 2000).

Cost-Benefit Analysis digunakan dalam meneliti bagaimana Prancis menilai keefektifan dan kesinambungan Operasi Barkhane. Analisis ini meliputi sumber daya militer, biaya keuangan, dan korban jiwa yang dihasilkan dari operasi tersebut sebagai upaya untuk memenuhi tujuan akhir dari *counter-terrorism* di Wilayah Sahel.

2. Prioritas strategis

Prioritas strategis mengacu pada kepentingan dan tujuan utama yang mengarahkan pada kebijakan dan tindakan luar negeri suatu negara dalam kancah global. Prioritas terbentuk oleh persepsi negara tentang kepentingan nasionalnya, masalah keamanan, nilai-nilai, dan lingkungan internasional. Prioritas strategis dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain serta dapat berubah seiring waktu disebabkan keadaan yang berkembang dan dinamika geopolitik yang berubah. (Smith et al., 2021)

Dalam hal ini, prioritas Prancis yang sebelumnya mengenai *counter-terrorism* di Wilayah Sahel dengan meluncurkan Operasi Barkhane kembali dievaluasi dalam hal apakah prioritas tersebut masih sejalan dengan kepentingan nasionalnya.

3. Dinamika regional

Dinamika regional menganalisis proses perubahan yang terjadi di dalam dan antar wilayah (Kingsley et al., 1996). Dalam hal ini, Prancis melihat adanya dinamika regional yang lebih luas, termasuk kapasitas dan kemauan mitra regional untuk lebih bertanggung jawab atas keamanan di Sahel. Bentuk rasionalitas Prancis

muncul disaat mereka meyakini bahwa perkembangan atas tanggung jawab keamanan di Wilayah Sahel oleh negara-negara anggotanya merupakan peluang untuk mentransisikan perannya dan mengurangi kehadiran militernya.

4. Pertimbangan politik

Pertimbangan politik timbul sehubungan dengan adanya interaksi antara individu dan kelompok terorganisir yang menghasilkan pelaksanaan kelak (Fishman & Fishman, 1957). Faktor politik dalam negeri, persepsi keberhasilan atau kegagalan Operasi Barkhane, dan opini publik dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang rasional. Prancis mempertimbangkan *costs and benefits* yang sehubungan dengan penghentian operasi, juga dampaknya terhadap politik domestiknya.

2.2.2 State Fragility

Konsep mengenai “*state failure*” mulai mencuat pada tahun 1990-an yang berarti bahwa negara “sama sekali tidak mampu untuk mempertahankan dirinya sendiri sebagai anggota komunitas internasional (Helman & Ratner, 1993). Dalam dekade selanjutnya, kegagalan merupakan konsep utama yang digunakan negara yang tidak stabil, namun selama bertahun-tahun konsep “*state fragility*” mendapatkan lebih banyak perhatian dimana konsep tersebut mengandung berbagai tingkat ketidakstabilan.

Salah satu definisi dari negara yang rapuh dipengaruhi oleh pandangan Machiavellian dan Weberian, mereka berpendapat bahwa “monopoli kekerasan” sangat penting bagi sebuah negara untuk berfungsi, jika hal itu hilang, maka akan terjadi kegagalan atau kerapuhan. Pandangan bahwa kerapuhan disebabkan oleh

ketidakmampuan negara untuk menyediakan fungsi-fungsi dasar bagi warga negaranya (Sternehäll, 2016).

Rothkopf memiliki ide mengenai kerapuhan bahwa seluruh negara bisa didefinisikan sebagai negara yang rapuh tergantung bagaimana penilaian barat mengenai stabilitas dan kerapuhan. ia mengkritik bahwa konsep *state fragility* adalah alat neo-kolonial yang digunakan oleh barat untuk memaksakan nilai-nilai mereka, terutama bekas koloni (Ayers, 2012).

Kerapuhan negara ditentukan berdasarkan kemampuan pemerintah untuk menjaga negara tetap berfungsi dan stabil, hal ini diukur melalui oleh prinsip-prinsip kerentanan diantaranya Otoritas negara, Legitimasi negara, dan Kapasitas negara.

1. Otoritas Negara. Kunci yang akan menentukan kekuasaan otoritatif pemerintah yaitu stabilitas ekonomi negara, monopoli kekerasan yang dipegang pemerintah, serta tingkat fungsi hukum negara. Permasalahan umum di negara rapuh yaitu korupsi dimana dalam berbagai kasus, tidak memiliki monopoli kekerasan memiliki potensi jumlah korban sipil yang tinggi karena penduduk seringkali menjadi korban konflik antara kelompok pemberontak dan negara. Warga sipil cenderung mencari perlindungan kepada kelompok informal serta fungsi hukum negara dapat diganti untuk memperkuat kekuatan para elit.

2. Legitimasi Negara. Badan politik harus diterima oleh penduduk dan mengikuti aturan hukum umum yang telah disepakati oleh warga negara agar sah. Dalam menilai kerapuhan negara, tingkat demokrasi dapat menjadi ukuran

dari ide demokratis seperti kebebasan pers, transparansi pemerintah, pemilu yang adil, dan hak asasi manusia.

3. Kapasitas Negara. Merupakan kapasitas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan umum seperti pembangunan manusia dan infrastruktur negara. Pembangunan manusia dapat mengukur kerapuhan negara dari bagaimana negara menyediakan pelayanan sosial bagi warganya seperti kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur seperti akses listrik, air, jalan, mesin, dan teknologi (Sternehäll, 2016).

Dalam konsep *state fragility*, anggapan rapuh atau tidaknya negara dapat diukur melalui 3 prinsip yaitu otoritas, legitimasi, dan kapasitas negara. Konsep ini membantu menjelaskan bagaimana kerapuhan negara-negara di Wilayah Sahel dapat menghentikan Operasi Barkhane yang berjalan sejak 2014 hingga 2022.

2.3 Asumsi Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis membuat asumsi penelitian sebagai berikut:

“Dengan kondisi wilayah Sahel yang tidak mampu keluar dari situasi state fragility meskipun telah mendapat dana bantuan jangka panjang yang sangat besar dari Prancis membuat Operasi Barkhane sebagai upaya counter-terrorism sulit untuk mencapai titik kesuksesan. Hal ini merugikan pihak Prancis sehingga penghentian Operasi Barkhane merupakan keputusan yang rasional.”

2.4 Kerangka Analisis

